

EFEKTIFITAS PENGAWASAN KHUSUS OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIGI

Azhar Ruddin

Azharruddin41@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims at determining whether the Special Surveillance conducted by Inspectorate of District Sigi has been going well or effectively. This research is a case study with a qualitative approach. The determination of research location and key informants were implemented purposively. The gathered data were analyzed in stages based on the information data of the informant that were obtained through observation, interviews and documentation. The result shows that of the three indicators to measure the effectiveness of Special Surveillance carried out by Inspectorate of District Sigi using the theory H. Emerson i.e. achievement of surveillance goal, achievement of surveillance target, and punctuality of surveillance, two indicators; achievement of surveillance target, and punctuality of surveillance are not running effectively. Meanwhile, the achievement of surveillance goal factor has been running well or effectively because this factor illustrates that in doing Special surveillance, Inspectorate has followed the mechanism and the investigator team always take an understanding of the examined object and also use their professionalism in determining the content form and communication intensity so that the examined objects immediately do improvements as directed by the investigator team.

Keywords: *Effectiveness, Special Surveillance, Inspectorate.*

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam suatu negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Oleh sebab itu dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah harus mampu mengurus rumah tangganya, sebagai akibat penyelenggaraan otonomi daerah terutama pemanfaatan berbagai potensi perlu ditunjang dengan pengawasan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dan seirama dengan kebijakan pembangunan nasional yakni diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, antar kota dan desa serta antar bidang dan sektor, yang pada akhirnya dapat

mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mencegah serta mengurangi terjadinya KKN adalah dengan cara menggerakkan roda pemerintahan di daerah serta memanfaatkan potensi yang tersedia dengan melakukan tingkat pengawasan yang efektif (T. Hani, 1999: 7; Robins, 2004: 53; Kurniawan, 2005: 109; Siagian, 2006: 31) dan efisien (Prawirosentono, 1992: 27; Tangkilisan, 2004: 242). Kebijakan dalam rangka pengawasan antara lain dengan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap: a.) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota; b.) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; c.) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian dijabarkan

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan pengawasan di daerah Kabupaten Sigi merupakan tanggung jawab kepala daerah yang dalam operasionalisasinya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manajemen birokrasi pemerintahan daerah tidak terlepas dari fungsi-fungsi pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sigi hampir tidak mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di daerah tetapi kebijakan pengawasan yang dilaksanakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Inspektorat Kabupaten sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 12 menyebutkan:

1. Inspektorat merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
4. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pengawasan terhadap rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga pemerintahan di daerah menjadi bagian dari manajemen pemerintahan daerah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997: 159) menjelaskan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan dengan begitu dilakukan dengan berbagai metode agar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menghasilkan *output* kinerja pemerintahan yang baik. (Siagian; 1986: 135; Sujamto, 1994: 63, Situmorang, 1998: 19, Winardi, 2000: 381),

Muchsan (2000: 39) mengemukakan bahwa pengawasan dalam aspek pemerintahan di Indonesia dibedakan dalam dua jenis yakni :

1. Pengawasan administratif yang berbentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
2. Pengawasan oleh kekuasaan kehakiman baik secara keperdataan maupun secara administratif.

Selanjutnya Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- 2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta

pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya;

- 5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Suatu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 21) "Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai" dalam segi pelaksanaan tugas oleh setiap bawahan, maka "Pengawasan merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil mana kala prestasi tidak seperti yang direncanakan".

Pengawasan baik yang bersifat reguler maupun khusus menjadi menjadi perhatian utama agar sesuai aspek tercapainya sasaran pengawasan dan aspek tepat waktunya pengawasan (Suyuti, 2010; Ruddin, 2015). Urgensi pengawasan adalah meminimalkan resiko biaya guna mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja pemerintah sehingga tepat sasaran dan bermanfaat. Sehingga ketika pengawasan itu dilakukan, tentunya ada temuan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pengambil kebijakan dalam suatu instansi/satuan kerja yang diharapkan dapat ditindak lanjuti.

Penelitian ini menggunakan Teori dari H. Emerson dalam Suwarno Handayiningrat, (1992:16), yang menyatakan bahwa Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan, sasaran dan tepat waktu yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan pengawasan maka ada 3 (tiga) indikator acuan efektifnya kegiatan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Sigi, yaitu:

1. Tercapainya tujuan pengawasan
2. Tercapainya sasaran pengawasan

3. Tepat waktunya pengawasan

Salah satu kegiatan dari bagian pengawasan adalah pengawasan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terjadwal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Inspektorat Kabupaten Sigi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi, meliputi:

1. Pengawasan Reguler
2. Pengawasan Khusus
3. Evaluasi Lakip
4. Pengawasan/Audit Investigatif
5. Tindak Lanjut Hasil pengawasan

Pada penelitian ini penekanan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah Efektifitas Pengawasan khusus, yakni pengawasan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah atau permintaan pejabat yang berwenang, pengawasan kasus-kasus pengaduan, diselenggarakan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut. Indikator yang diteliti meliputi tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, dan tepat waktunya pengawasan. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigimasih terdapat Kendala/ permasalahan realitas yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada indikator tujuan pengawasan belum tercapai, hal ini disebabkan sering dijumpai berbagai macam pelanggaran dan penyimpangan yang berulang dari tahun sebelumnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/ daerah. Pada aspek Sasaran pengawasan, efektifitas belum tercapai dikarenakan belum semuanya laporan berupa pengaduan masyarakat dan pejabat yang berwenang yang melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk dilakukan pengawasan

Oleh Inspektorserta pada Aspek tepat waktunya pengawasan yaitu lambatnya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan data temuan hasil pemeriksaan dan penyusunan data/rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan.

Mengamati kenyataan yang terjadi berkenaan dengan fenomena pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi mendorong peneliti untuk meneliti sejauhmana sesungguhnya efektifitas Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*In-Dept Intetrview*). Imam Gunawan (2013:85) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendiskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan kuantitatif dengan positivismenya.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian sedianya direncanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (tentative), yakni sejak bulan Oktober s/d Desember 2014. Namun karena situasi dan kondisi dilapangan penelitian yang tidak memungkinkan atau mendapatkan hambatan non teknis, maka pelaksanaan penelitian dimungkinkan mengalami perubahan, sehingga waktunya dapat diperpanjang hingga bulan berikutnya. Informan pada penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) yakni ditetapkan sebanyak 5 orang informan dengan pertimbangan bahwa informan dianggap kompeten yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Yaitu yang menduduki jabatan Eselon III, Pejabat

Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerahpada Inspektorat Kabupaten Sigi.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung yang dilakukan melalui wawancara dengan 5 (lima) informan atau narasumber. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait Peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (*observasi*), wawancara kepada para informan (*interview*) dan pengambilan gambar kondisi di lapangan (*dokumentasi*).

Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui a). editing data yaitu Proses pengolahan data mentah yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data direduksi, dirangkum dan dipilih sesuai permasalahan yang diteliti. b). Klasifikasi data adalah penggolongan data yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas dan kesimpulan yang tepat, c). Interpretasi data adalah data yang telah dimasukkan ke dalam tabel kemudian dicari makna atau artinya yang lebih luas dari data dan diolah dengan menghubungkan pada empat pengetahuan serta hasil penemuan yang ada, d). Menyimpulkan Data adalah data yang telah diinterpresepsi kemudian disimpulkan dengan melihat hasil perhitungan dan hasil penemuan data yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Definisi konsep merupakan penjelasan atas istilah yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi konsep pada penelitian ini adalah: Efektifitas pengawasan khusus adalah tingkat sejauh mana Pengawasan Khusus berfungsi terhadap efektifitaskinerja aparat pengawas.

Pengawasan Khusus akan berfungsi efektif apabila dimensi-dimensi Efektifitas Pengawasan Khusus tercapai, yang meliputi:

1. Tujuan Pengawasan adalah mengantisipasi penyalahgunaan keuangan Negara/daerah pada obyek pengawasan;
2. Sasaran Pengawasan adalah seluruh permintaan pejabat yang berwenang dan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi penyelewengan;
3. Tepat waktunya Pengawasan adalah tepat waktunya pengawasan khusus dilakukan oleh Aparat Pengawas sesuai program PKPT dan juga penyelesaian berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.) Efektifitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi

Efektifitas pengawasan khusus dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi. Ketiga indikator ini akan di perjelas dalam pembahasan ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dengan demikian, efektifitas pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari segi sasaran pengawasan dan tepat waktunya pengawasan. Kedua faktor tersebut selama ini dalam pelaksanaan pengawasan khusus sering kali mengalami masalah didalamnya karena kedua indikator ini terutama masalah sasaran pengawasan ini tidak masuk dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Sigi. Mengenai tepat waktunya pengawasan juga tidak efektif, hal ini dikarenakan adanya konflik internal dalam pengaduan tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian,

berdasarkan hasil penelitian indicator tujuan Pengawasan cukup efektif karena berkurangnya jumlah kerugian Negara/Daerah dan tidak adanya temuan berulang dari tahun sebelumnya.

2.) Pencapaian tujuan pengawasan

Dalam melakukan pengawasan khusus tentunya punya tujuan yang ingin dicapai, tujuan pengawasan khusus adalah memberikan saran kepada pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan khusus juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas public.

Maka dari itu untuk mengetahui tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan khusus. Seperti yang disampaikan oleh Machmud Ibrahim selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Agar pengawasan khusus yang dilakukan oleh pejabat fungsional Inspektorat efektif, maka kami selaku coordinator dan penanggungjawab tim selalu memberikan arahan dan petunjuk serta standar yang berlaku dalam melakukan pengawasan khusus, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai harapan tim. dan hasilnya setiap pengawasan khusus yang kami laksanakan dari tahun ketahun terjadi penurunan terhadap kerugian Negara/ daerah”. (wawancara 1 Desember 2014).

Tujuan pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi pada dasarnya telah efektif. Karena Inspektorat dalam melakukan pengawasan khusus telah melakukan langkah-langkah serta standar yang berlaku, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pengawasan khusus dapat tercapai. Oleh karena itu tujuan pengawasan khusus menjadi salah satu factor yang sangat penting untuk meningkatkan

efektifitas Pengawasan Khusus agar tidak terjadi lagi kerugian Negara/daerah ditahun mendatang dan pengelolaan keuangan makin baik sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini senada yang disampaikan oleh Jhon Lie selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan pengawasan khusus terlebih dahulu kami para pejabat Struktural dan pejabat fungsional yang terlibat dalam Tim selalu mengadakan pembekalan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada obyek pemeriksaan (obrik) dan bagaimana penyelesaiannya, sehingga jelas arah tujuan pemeriksaan dilaksanakan. Hal inilah yang yang mendorong penurunan terjadinya kerugian Negara/daerah. Dan dimana setiap Tim melaksanakan Pengawasan khusus selalu memberikan arahan dan solusi sehingga tidak terulang kasus serupa”.(wawancara 1 Desember 2014).

Dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Kabupaten Sigi dari sisi pencapaian tujuan Pengawasan khusus telah efektif. Hal ini karena Inspektorat dalam melakukan pengawasan khusus telah mengikuti mekanisme dan Tim pemeriksa selalu melakukan pemahaman terhadap obyek yang diperiksa serta menggunakan profesionalnya dalam menentukan bentuk isi dan intensitas komunikasi sehingga obyek yang diperiksa dengan cepat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai arahan Tim Pemeriksa. Sementara menurut Ramadan selaku Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

“Saya menganggap bahwa pengawasan khusus dari sisi tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah mengikuti Norma pemeriksaan, oleh karena Tim telah melakukan Pra perencanaan pemeriksaan sampai pada tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan sehingga apa yang diinginkan dalam tujuan awal pengawasan yaitu agar ditahun berikutnya tidak terjadi

lagi kasus serupa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah”. (wawancara 1 Desember 2014).

Ade Irma selaku Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

“Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi dilakukan dalam rangka perintah atau permintaan pejabat yang berwenang untuk menanggapi aspirasi dan pengawasan serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut. agar pengawasan berjalan terarah diperlukan informasi umum tentang kebenaran pengaduan tersebut. Hal ini telah dilakukan Tim pemeriksa untuk melihat sejauhmana terjadi fraud didalamnya, sehingga dimasa mendatang tidak terjadi lagi kasus serupa yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah” dan pengelolaan keuangan semakin baik.(wawancara 1 Desember 2014).

Pengawasan khusus dimaksudkan untuk mendapat tingkat kepercayaan atas kesesuaian antara informasi yang diadukan dengan kriteria yang mendasarinya. Pengawasan khusus diperlukan untuk memonitor apakah aduan yang dilaporkan telah terjadi fraud didalamnya, hal ini untuk menjamin bahwa bahwa benar tidaknya terjadi bentuk kecurangan didalam sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan system pemerintahan yang transparan, akuntabel, kondusif dan komprehensif serta peningkatan kapasitas pejabat pemeriksa untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi melakukan control yang efisien, efektif dan ekonomis serta komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan terpadu.

Sedangkan menurut Awaluddin selaku Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Sigi mengatakan bahwa :

“Pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menpan-RI No.SE 102/M.PAN/01/05, tanggal 7 Januari 2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) .Demikian pula tahapan dalam melakukan pengawasan khusus telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.sehingga tujuan pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa sudah efektif dan diharapkan kedepannya sudah tidak terjadi lagi kerugian negara/daerah dan pengelolaan keuangan semakin baik.(wawancara 1 Desember 2014).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan, telah menggambarkan bahwa tujuan pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi telah berjalan efektif. Oleh karena itu, pengawasan khusus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan di waktu yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan semakin lebih baik sesuai dengan amanat Undang-undang. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan khusus telah berjalan efektif, pengawasan khusus telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan tentang etika pengawasan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan hal inilah yang membuat tidak adanya temuan berulang pada Obrik Pemeriksaan dan pengelolaan keuangan semakin baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.) Pencapaian sasaran pengawasan

Pencapaian sasaran pengawasan sangat penting bagi proses manajemen yang di jalankan. Dengan demikian akan diketahui seberapa banyak sasaran pengawasan khusus yang dapat dilaksanakan dan yang tidak/belum dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditentukan. Untuk mencapai

suatu tujuan pengawasan khusus, maka ditetapkanlah sasaran yang akan dilaksanakan dan salah satunya adalah obyek pemeriksaan (Obrik) yang dilaporkan.

Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian sasaran Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan khusus. Seperti yang disampaikan oleh Machmud Ibrahim selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Sasaran pengawasan khusus terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Sigi tidak selamanya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan tidak ada dalam perencanaan program kerja yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sehingga anggaran tidak tersedia”.(wawancara 1 Desember 2014).

Pencapaian sasaran pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi pada dasarnya tidak efektif. Karena Inspektorat dalam melakukan pengawasan khusus adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diperiksa/ diawasi berjalan menurut yang semestinya.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Jhon Lie selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang sasaran pengawasan khusus, utamanya pengaduan masyarakat atau permintaan pejabat yang berwenang pada hakekatnya tidak dapat dilakukan oleh Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sigi karena terkendala sumber dana yang tidak ada dalam DPA Inspektorat dan sumber daya manusia yang terbatas utamanya kurangnya tenaga pejabat fungsional”.(wawancara 1 Desember 2014).

Dengan demikian dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Kabupaten Sigi dari sisi

pencapaian sasaran Pengawasan kurang efektif. Hal ini karena Inspektorat tidak melakukan pengawasan khusus disebabkan terbatasnya anggaran dan kurangnya tenaga aparatur pemeriksa sehingga banyak obyek yang harus diperiksa tidak dapat dilaksanakan, hal ini bisa saja berdampak pada terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah. Sedangkan menurut Awaluddin selaku Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Sigi mengatakan bahwa :

“Berbicara tentang pencapaian sasaran pengawasan khusus tidak terlepas dari hampir setiap saat laporan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Sigi selalu aduan baik itu dari pejabat maupun dari tokoh masyarakat meminta Inspektorat untuk melakukan audit atau pemeriksaan khusus. tetapi tidak semua laporan itu dapat ditindaklanjuti. kita melihat ada berapa kegiatan pengawasan khusus dalam PKPT yang tersusun dan jumlah personil yang tersedia.” (wawancara 1 Desember 2014).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan bahwa pencapaian sasaran pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tidak efektif. Masih banyak pengaduan masyarakat yang melaporkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan khusus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan di waktu yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan semakin lebih baik sesuai dengan amanat Undang-undang.

Maka kesimpulannya adalah pencapaian sasaran pengawasan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tidak efektif, sehingga perlunya penambahan kegiatan Pemsus dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Penambahan personil pejabat fungsional baik itu dari fungsional auditor maupun pejabat fungsional pengawas urusan pemerintah daerah.

4.) Tepat waktunya pengawasan

Efektifitas merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat waktu dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berarti aspek ketepatan waktu menjadi penentu atas efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Inspektorat dalam melakukan pengawasan tentunya berdasarkan jadwal yang telah disusun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain dalam melakukan pengawasan, dalam jadwal dimaksud lamanya pengawasan telah ditentukan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana tepat waktunya Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan khusus. Seperti yang disampaikan oleh Machmud Ibrahim selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa selama ini setiap pelaksanaan pemeriksaan khusus produk akhir yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu tidak tepat waktu. Dalam program kerja pemeriksaan (PKP) yang dibuat oleh tim, laporan harus sudah masuk ke bagian pelaporan dan evaluasi sekretariat Inspektorat bersamaan dengan berakhirnya masa penugasan.” (wawancara 1 Desember 2014).

Oleh karena itu, sebaiknya pimpinan dalam hal ini Inspektur untuk lebih tegas dalam pemberian penugasan tim agar jangan sampai keterlambatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menyebabkan tertundanya kegiatan yang lain. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan berikutnya dalam melakukan pengawasan.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Jhon Lie selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengatakan bahwa:

“Harus diakui bahwa produk akhir dari penugasan pengawasan khusus adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hal inilah yang selalu menjadi kendala dalam penugasan dan akan berdampak pada program kerja yang telah disusun dalam PKPT Inspektorat. LHP selalu tidak tepat waktu diselesaikan biasanya karena terkendala dengan obrik yang cukup jauh dan informan yang dibutuhkan biasanya tidak didapati”. (wawancara 1 Desember 2014).

Dengan demikian dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Kabupaten Sigi dari sisi tepat waktunya Pengawasan kurang efektif. Hal ini karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan data temuan hasil pemeriksaan dan penyusunan data/rekapitulasi temuan hasil Pemeriksaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga indikator tersebut, dua indikator diantaranya belum berjalan baik atau kurang efektif yaitu pencapaian sasaran Pengawasan dan tepat waktunya pengawasan ini. Sementara indikator pencapaian tujuan pengawasan ini sedikit sudah berjalan dengan baik sebab Inspektorat dalam melakukan pengawasan khusus telah mengikuti mekanisme dan Tim pemeriksa selalu melakukan pemahaman terhadap obyek yang diperiksa serta menggunakan profesionalnya dalam menentukan bentuk isi dan intensitas komunikasi sehingga obyek yang diperiksa dengan cepat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai arahan Tim Pemeriksa.

Padahal dari ke tiga indikator tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi dan ini juga sangat memberi pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan public. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa efektifitas pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan efektif karena beberapa indicator didalamnya masih mengalami permasalahan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran kami dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Sigi hendaknya lebih meningkatkan frekwensi pengawasan khusus sehingga pencapaian pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah SKPD dan pemekaran wilayah sehingga masih memerlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.
2. Melihat kondisi anggaran pembinaan dan pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah kondisi SKPD dan Pemekaran wilayah, hendaknya Pemerintah Kabupaten Sigi lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-642 tahun 2007, dimana alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan minimal sebesar 1 % dari APBD.
3. Perlunya penambahan waktu pemeriksaan, sehingga proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terlambat dan diselesaikan tepat waktu serta memberi teguran yang tegas pada tim pemeriksa yang lambat dalam penyelesaian tugas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Prof Dr. Hj. Fadlia Vadlun Yotolembah, S.E M.Si selaku ketua pembimbing dan Bapak Dr. Natsir Mangansing, M.Si selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Emerson H. *Psykology and Industrial Efficiency*. Englewood Clief. Particehall.
- Muchsan. 2000. *Sistim Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PeradilanTata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 *tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.
- SP. Siagian. 2006. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sujamto. 1994. *Aspek-AspekPengawasan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suyuti. (2010). *Analisis Efektifitas Pengawasan Reguler dalam Pembinaan dan Pengawasan Keuangan oleh Inspektorat Kota Palu*. Palu
- T. Hani Handoko, 1984. *Manajemen Edisi 2*. BFEE. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rineka Cipta. Jakarta.